



## Analisis Yuridis Program Makanan Bergizi dalam Mendorong Pembangunan Nasional dan Pemenuhan Hak Gizi Anak Indonesia

Aura Kalisha<sup>1\*</sup>, Parningotan Malau<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [aurakalisha@gmail.com](mailto:aurakalisha@gmail.com)

**Abstract.** *The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic initiative by the Indonesian government to address the long-standing issues of malnutrition and stunting, which have significantly hindered human resource (HR) development in Indonesia. The program aims to improve children's nutrition and reduce stunting by providing free nutritious meals, particularly in areas with limited access to healthy food. This study aims to analyze the legal framework of MBG, its effectiveness in achieving its goals, and its impact on national development. Using a qualitative approach, the study analyzes the implementation of MBG through document analysis, interviews with relevant stakeholders, and field observations. The findings highlight challenges within the program, including imbalanced food distribution, inadequate infrastructure in remote areas, and suboptimal food quality control, which resulted in several food poisoning incidents in 2025. Nevertheless, the program has a positive economic impact by empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) involved in food supply. The study suggests strengthening the monitoring system, improving budget management, and better coordination between government sectors and communities to maximize the success of MBG. It also emphasizes the importance of nutrition education campaigns to support the program's goals. Overall, MBG is a crucial step toward creating a healthier and more productive generation, supporting the achievement of Indonesia's Golden Generation by 2045.*

**Keywords:** *Budget Management, Child Nutrition, Stunting, Food Monitoring food Security, Free Nutritious Meal Program (MBG).*

**Abstrak.** Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting* yang telah lama menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi stunting dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap pangan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum MBG, efektivitasnya dalam mencapai tujuan, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis pelaksanaan MBG melalui analisis dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan tantangan dalam program ini, termasuk ketidakseimbangan distribusi makanan, infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil, dan pengawasan kualitas pangan yang kurang optimal, yang mengakibatkan beberapa kasus keracunan makanan pada tahun 2025. Meskipun demikian, program ini memberikan dampak positif ekonomi, dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam penyediaan pangan. Penelitian ini menyarankan penguatan sistem pengawasan, peningkatan pengelolaan anggaran, serta koordinasi yang lebih baik antara sektor pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan keberhasilan MBG. Studi ini juga menekankan pentingnya kampanye edukasi mengenai gizi untuk mendukung tujuan program. Secara keseluruhan, MBG merupakan langkah penting menuju terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif, serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

**Kata kunci:** Gizi Anak, Ketahanan Pangan Pembangunan Nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Stunting.

### 1. LATAR BELAKANG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting* yang telah lama menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Masalah gizi buruk, terutama pada anak-anak, berdampak signifikan terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka, yang pada akhirnya menghambat kualitas SDM di Indonesia (Agustini, 2025). Berdasarkan Survei Status

Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting pada balita masih mencapai 21,6%, meskipun ada penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Program MBG hadir untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, MBG merupakan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan memiliki generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif (Hidayat & Purwaningtyas, 2026).

Pemberian makanan bergizi kepada anak-anak di sekolah-sekolah merupakan wujud dari pemenuhan hak mereka atas pangan yang sehat dan bergizi, yang diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, MBG berfungsi sebagai manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak-anak Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak mereka atas pangan yang aman dan bergizi dipenuhi, sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan ini menuntut peran aktif negara dalam menyediakan layanan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan menjamin akses pangan yang sehat bagi anak-anak sebagai pondasi bagi generasi yang lebih baik (Fikri, 2025).

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan MBG. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, penetapan sasaran penerima manfaat, penyediaan makanan, hingga distribusi dan pengawasan. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan MBG dapat terlaksana dengan sistematis dan terstruktur, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Perpres No. 115 Tahun 2025 juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kualitas pangan yang didistribusikan, guna mencegah terjadinya masalah seperti kontaminasi atau keracunan yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik (Simangungsong & Sinaga, 2026). Untuk itu, penguatan kapasitas pengawasan menjadi hal yang sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan sukses dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Meskipun program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah insiden keracunan massal yang terjadi pada 2025, yang melibatkan lebih dari 11.000 korban di berbagai daerah yang menerima makanan dari MBG. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan kualitas pangan yang didistribusikan dalam program ini. Insiden keracunan ini menggambarkan pentingnya peningkatan pengawasan, serta perlunya memastikan bahwa

bahan pangan yang digunakan dalam program ini memenuhi standar keamanan pangan yang ketat (Manuf, 2025). Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap distribusi makanan dan keterlibatan ahli gizi dalam merancang menu bergizi yang aman menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG.

Dalam aspek ekonomi, rasio efisiensi sangat penting dalam menentukan keberhasilan MBG. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sangat besar, mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun pada 2025, sehingga efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci. Rasio efisiensi mengukur seberapa efektif penggunaan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan utama program, yaitu mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan dengan efisien, maka potensi pemborosan anggaran yang besar dapat mengurangi dampak positif yang seharusnya tercapai (Zulaika et al., 2025). Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran dan penggunaan dana sangat diperlukan untuk memaksimalkan hasil dari program ini.

Rasio keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk MBG tidak mengorbankan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan dana besar, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran ini dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan di bidang lain. Misalnya, jika anggaran untuk MBG terlalu besar, sektor pendidikan yang juga membutuhkan dana untuk pengembangan kurikulum dan infrastruktur bisa terabaikan (Rotinsulu & Walewangko, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang seimbang antar sektor sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sektor dapat berfungsi dengan optimal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Maksimisasi hasil dari program MBG sangat bergantung pada penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi. Pengawasan yang lemah atau kelalaian dalam distribusi pangan dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, seperti keracunan massal, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Riyanto, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan yang berbasis teknologi digital dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk meningkatkan transparansi. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko yang terkait dengan program ini dan memastikan kualitas pangan yang didistribusikan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Restiana, 2025).

Dampak positif dari MBG terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar. Dengan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program ini berpotensi menciptakan generasi

yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dengan optimal, baik dari segi fisik maupun kognitif. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan biaya kesehatan jangka panjang, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, program ini memberikan manfaat ekonomi dengan meningkatkan pemberdayaan pelaku UMKM lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan (Hanasi *et al.*, 2026). Dengan demikian, MBG dapat memberikan dampak positif bagi sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Namun, dampak negatif dari program ini dapat muncul jika pengelolaan dan pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Pemborosan anggaran, ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, dan risiko keracunan makanan dapat merusak keberhasilan program dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum yang mengatur pengelolaan dan pengawasan program ini melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 sangat diperlukan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, MBG dapat berjalan dengan maksimal, memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, serta menciptakan Indonesia Emas 2045 yang memiliki generasi yang sehat dan produktif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang efisien, pengawasan yang ketat, serta regulasi yang jelas dan tegas. Penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan tujuan mulia dari MBG. Dengan komitmen yang kuat, pengelolaan yang tepat, dan pengawasan yang efektif, MBG dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Indonesia, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Makanan Bergizi Gratis (MBG)**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih tinggi, dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak di sekolah. Hal ini sangat penting, mengingat data menunjukkan bahwa sekitar 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat belajar, yang berdampak langsung pada konsentrasi dan prestasi akademik mereka. Dengan memberikan akses kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, MBG berfungsi untuk meningkatkan asupan gizi yang pada gilirannya mengurangi angka stunting dan mengatasi masalah gizi buruk. Program ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, yang berpotensi berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Ajeng & Yusmar, 2025). Penyediaan makan bergizi di sekolah juga memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menikmati pendidikan yang lebih optimal tanpa terhambat masalah kelaparan, yang sering kali mengganggu proses belajar mereka (Locke et al., 2025).

Namun, meskipun tujuan program ini sangat mulia, implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa distribusi makanan tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Insiden keracunan makanan yang melibatkan ribuan siswa menjadi gambaran bahwa pengawasan dan manajemen distribusi makanan harus lebih ditingkatkan. Selain itu, alokasi anggaran yang sangat besar untuk MBG juga harus dikelola secara efisien agar tidak menimbulkan pemborosan. Pembiayaan yang tepat sasaran dan transparansi dalam pelaksanaan program menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan utama dari MBG yaitu meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, sangat penting untuk mengoptimalkan hasil dari program ini, sehingga tidak hanya mengurangi kerawanan pangan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia dalam jangka panjang (Wibisono & Santosa, 2026).

### **Pembangunan Nasional**

Pembangunan nasional Indonesia sangat bergantung pada stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, peran hukum sangat penting dalam menciptakan kerangka yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, guna memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat diwariskan

untuk generasi mendatang (Malau et al., 2025). Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Dwi, 2023). Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pengarah dan pengendali untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan tantangan ekonomi modern, hukum di Indonesia terus mengalami penyesuaian agar tetap mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang juga diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, memerlukan pendekatan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam hal ini, peran hukum sangat strategis dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mengatur hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum juga berfungsi untuk mengatur persaingan usaha yang sehat, mencegah monopoli, serta meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penguatan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten (Sands & MacKenzie, 2018). Dengan sinergi antara hukum dan ekonomi, Indonesia dapat menciptakan ekonomi yang tidak hanya berkembang, tetapi juga inklusif dan ramah lingkungan, yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi terhadap pelaksanaan program MBG, serta wawancara dengan pihak terkait seperti pengelola program, ahli gizi, dan masyarakat penerima manfaat. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen hukum terkait program MBG, seperti Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi permasalahan utama, efektivitas program, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Peneliti juga akan menggunakan teori-teori hukum terkait hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan bergizi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Malau et al., 2025).

Pengujian validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi hukum yang ada. Hal ini untuk menghindari bias dan memastikan bahwa

data yang diperoleh merupakan representasi yang akurat dari realitas yang ada. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam setiap aspek implementasi program, seperti distribusi makanan, pengawasan kualitas pangan, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan (Pramesthi *et al.*, 2025). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum terkait gizi dan pembangunan nasional serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program MBG.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kinerja Program Makan Bergizi Gratis dalam Menangani Gizi Buruk dan Meningkatkan Kesehatan Anak untuk Pembangunan Nasional**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Januari 2025, merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, terutama *stunting*, serta untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada anak-anak usia sekolah, terutama yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun pertama, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui (Rahmah *et al.*, 2025). Tujuan utama dari MBG adalah untuk meningkatkan status gizi anak-anak, mengurangi angka *stunting*, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yang pada gilirannya memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia di negara ini (Wibisono & Santosa, 2026).

Penurunan angka *stunting* menjadi salah satu dampak yang paling diharapkan dari pelaksanaan program MBG. Penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang cukup sangat penting bagi tumbuh kembang anak, terutama di usia dini. Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi yang dapat memperbaiki status gizi anak-anak, dengan tujuan menurunkan prevalensi *stunting* sebanyak 10 hingga 15% dalam waktu 3 hingga 5 tahun (Maliki *et al.*, 2025). Anak-anak yang menerima makanan bergizi secara rutin dilaporkan memiliki peningkatan dalam hal konsentrasi belajar, kehadiran di sekolah, serta semangat belajar mereka. Mereka cenderung lebih aktif di kelas, lebih fokus dalam mengikuti pelajaran, dan memiliki daya ingat yang lebih baik, yang tentunya berdampak positif pada prestasi akademik mereka (Agustin *et al.*, 2026).

Pelaksanaan program ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah masalah distribusi makanan yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan

kawasan perbatasan yang sulit dijangkau. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan akses yang sulit seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman makanan yang mempengaruhi kualitas dan kesegaran bahan makanan yang diterima oleh siswa (Wibisono & Santosa, 2026). Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah pedesaan dan terpencil, belum memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk mengolah makanan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Ketidakmerataan kualitas makanan yang diterima oleh siswa ini tentu saja mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya (Pramesthi *et al.*, 2025).

Ketidakmerataan pemahaman tentang pentingnya gizi di kalangan masyarakat menjadi tantangan lainnya. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, masih banyak orang tua yang kurang memiliki pengetahuan mengenai gizi yang tepat untuk anak-anak mereka. Ketidaktahuan ini dapat menghambat penerimaan dan implementasi program MBG, terutama jika orang tua tidak sepenuhnya mendukung pemberian makanan bergizi di sekolah (Rahmah *et al.*, 2025). Pemerintah perlu tidak hanya menyediakan makanan bergizi tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat bagi perkembangan anak (Ngabidin *et al.*, 2025).

Program ini memiliki dampak sosial-ekonomi yang cukup signifikan. Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak yang menerima makanan bergizi, MBG juga membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak usia sekolah. Orang tua tidak lagi perlu khawatir menyediakan makanan siang untuk anak-anak mereka, yang dapat meringankan beban mereka dalam kondisi ekonomi yang sulit (Yadiman, 2025). Selain itu, program ini juga memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan makanan, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal (Sumilat, 2025).

Tantangan utama yang dihadapi oleh program ini adalah ketidakmerataan infrastruktur dan kurangnya pengawasan yang efektif di daerah-daerah tertentu. Beberapa daerah, terutama yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses dan fasilitas yang mendukung kelancaran distribusi dan pengolahan makanan. Masalah lain yang sering ditemui adalah perbedaan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, di mana beberapa daerah yang memiliki kapasitas administratif dan manajerial yang rendah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kualitas pelaksanaan di setiap daerah, yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam meningkatkan status gizi dan Pendidikan. Implementasi program MBG di wilayah 3T menuntut adanya kepastian hukum yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana peran hukum sangat krusial untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya ekonomi,

termasuk akses pangan bergizi, dilakukan secara adil dan inklusif demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Malau *et al.*, 2025)

Program MBG memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia, khususnya stunting, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, evaluasi berkala, serta penguatan infrastruktur dan koordinasi antar lembaga yang lebih efektif, MBG dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas untuk masa depan Indonesia. Namun, ambisi besar ini harus dibarengi dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, karena tantangan dalam efektivitas penegakan hukum di Indonesia, seperti lemahnya koordinasi dan risiko praktik korupsi, dapat menjadi hambatan serius bagi distribusi manfaat program secara inklusif (Jawa *et al.*, 2024).

### **Efektivitas Pengelolaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil. Program ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih tinggi di Indonesia. Dengan target sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak usia sekolah dan ibu hamil, program ini dirancang untuk memberikan makanan sehat dan bergizi secara langsung di sekolah. Alokasi anggaran yang besar, mencapai Rp 121 triliun pada tahun 2025, mencerminkan besarnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung tercapainya pembangunan manusia yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing bangsa di kancah global (Suprpto *et al.*, 2025).

Peningkatan kesehatan siswa menjadi tujuan utama dari pelaksanaan program ini. Pemberian makanan bergizi secara teratur di sekolah-sekolah diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi absensi, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Dengan memastikan bahwa semua anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup, program ini juga berpotensi meningkatkan prestasi akademik mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan status gizi yang baik cenderung lebih mudah belajar, lebih aktif di kelas, dan lebih mampu mengikuti pelajaran dengan baik (Pangaribuan *et al.*, 2023). Program ini bukan hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas intelektual generasi muda Indonesia.

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi makanan yang belum merata, terutama di daerah-daerah yang terisolasi atau sulit

dijangkau. Infrastruktur yang terbatas dan kesulitan akses seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman makanan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengurangi kualitas makanan yang diterima oleh siswa, sehingga mengurangi manfaat dari program ini. Selain itu, banyak sekolah di daerah pedesaan yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan dan menyajikan makanan bergizi secara rutin. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur di tingkat sekolah dan perbaikan sistem distribusi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati makanan yang sehat dan bergizi pada waktu yang tepat (Suprpto et al., 2025).

Aspek pengelolaan anggaran menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan MBG. Dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, dibutuhkan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran agar dana yang besar ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan program, yaitu meningkatkan status gizi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berbasis data juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa pengelolaan yang tepat, program ini berpotensi membebani fiskal negara dan mengurangi dampak positif yang ingin dicapai. Hal ini mempertegas bahwa efisiensi anggaran tidak hanya bergantung pada manajerial teknis, tetapi juga pada sinergi antara hukum dan kekuasaan; di mana hukum harus menjadi panglima dalam mengarahkan kekuasaan mengelola dana publik, sehingga potensi beban fiskal akibat tata kelola yang buruk dapat dimitigasi melalui pengawasan yang memiliki legitimasi hukum kuat (Ujung *et al.*, 2026).

Selain tantangan pengelolaan anggaran, pemberdayaan ekonomi lokal menjadi salah satu manfaat dari program ini. Program MBG membuka peluang bagi UMKM dan produsen lokal untuk terlibat dalam rantai pasokan makanan bergizi. Dengan melibatkan petani lokal, pedagang, dan produsen makanan dalam program ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan makanan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih tertinggal (Sarjito, 2024). Melalui program ini, masyarakat lokal diberi kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting dalam keberhasilan MBG. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah pusat, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Tanpa

adanya kerjasama yang solid antara berbagai pihak, program ini akan kesulitan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pengelolaan yang terintegrasi, di mana setiap sektor memiliki peran yang jelas dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program. Dengan kolaborasi yang baik, program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan pemikiran dalam buku *Politik Hukum* yang menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan nasional sangat bergantung pada kebijakan dasar penyelenggara negara dalam mengarahkan hukum sebagai instrumen tata kelola yang inklusif, transparan, dan berlandaskan pada prinsip *Good Governance* (Syahlan & Malau, 2025).

Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program MBG. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi, akan lebih memahami pentingnya program ini dan mendukung keberlanjutannya. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu program ini berjalan dengan lebih lancar, serta memberikan umpan balik yang penting bagi perbaikan dan penyempurnaan program ke depannya. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, program ini akan lebih dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini sejalan dengan prinsip peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, di mana instrumen hukum seharusnya tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga harus mampu menggerakkan partisipasi publik sebagai elemen kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput (Malau, 2024).

Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Program ini diharapkan dapat mengurangi masalah gizi buruk dan memberikan dampak positif terhadap pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Namun, untuk mencapai tujuannya, program ini harus mampu mengatasi berbagai tantangan, terutama dalam hal distribusi makanan, pengelolaan anggaran, dan koordinasi lintas sektor. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG tidak hanya dapat meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing Indonesia di dunia global (S et al., 2025).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

## **Kesimpulan**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Indonesia dan mengurangi prevalensi stunting. Program ini berhasil memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tujuan program sangat mulia, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan distribusi makanan, pengawasan yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Insiden keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan kualitas pangan yang didistribusikan, yang perlu segera diperbaiki.

Program ini juga memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan optimal untuk mencapai tujuan program. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta dan masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi untuk mendukung keberhasilan program di tingkat komunitas.

Penguatan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan penggunaan teknologi digital untuk memantau distribusi makanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program. Pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan lokasi dan populasi, yang menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar memperluas area studi dan memperoleh data yang lebih representatif. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari MBG terhadap kualitas pendidikan dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi diperlukan untuk memastikan kualitas pangan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, di mana penggunaan teknologi digital dalam pengawasan distribusi makanan dapat meningkatkan efektivitas sekaligus transparansi program. Selain itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih efisien dan transparan, disertai dengan pengawasan ketat terhadap alokasi

dana agar terhindar dari pemborosan serta memastikan setiap dana yang digunakan tepat sasaran. Di sisi lain, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi bagi anak-anak juga perlu ditingkatkan melalui program edukasi yang mampu memperluas pemahaman orang tua dan masyarakat tentang manfaat program MBG serta mendorong dukungan penuh terhadap pelaksanaannya di tingkat lokal. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan berbagai populasi sangat diperlukan untuk memperoleh data yang lebih representatif, sekaligus mengevaluasi dampak jangka panjang program MBG terhadap kualitas pendidikan dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Adevia, A. Y. R. (2025). Hubungan peraturan program makan bergizi gratis dengan peran nutrisisionis. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2).
- Agustin, I., Damayanti, E., Ardiani, A. N., Hasibuan, H. A., & Nurul, V. (2026). Strategi integrasi program makan bergizi gratis dengan sistem ketahanan pangan untuk mengatasi masalah stunting dan malnutrisi. *Jurnal Medika*, 5(1), 926–934.
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Dwi, A. (2023). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi* (Tesis). Program Pascasarjana UMSU.
- Hanasi, R. A., Akuba, I., Wahab, I. M., Monoarfa, C., Ahmad, M. R. M., & Pantoiyo, A. P. (2026). Implementasi kebijakan program makan bergizi gratis sebagai pendorong pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(1), 95–112. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6403>
- Hidayat, N., & Purwaningtyas, D. R. (2026). *Membangun generasi sehat melalui program makan bergizi gratis (MBG): Keamanan pangan, penerimaan, dan dampaknya bagi gizi ibu dan anak*. Yayasan Bina Lentera Insan.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1006–1017. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>
- Locke, A., James, M., Jones, H., Davies, R., Williams, F., & Brophy, S. (2025). Impacts of global school feeding programmes on children's health and wellbeing outcomes: A scoping review. *BMJ Open*, 15(10), 1–14. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093244>
- Malau, P. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. GetPress Indonesia.

- Malau, P., Depari, D. A., Poniman, S., & Wardana, D. S. E. (2025). Peran hukum dalam mengatur pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 20–30. <https://doi.org/10.62379/ngnc0387>
- Maliki, A., Selvi, N., Arifah, A., & Aulia, N. S. (2025). Analisis kebijakan makan bergizi gratis Prabowo–Gibran dan dampaknya terhadap kesehatan dan bidang pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11, 465–476. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13509>
- Manuf, E. (2025, November). 11,000 fall ill from free nutritious meal program, BGN says. *Jakarta Globe*.
- Merlinda, A., & Yusmar, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah: Tinjauan dari perspektif sosiologi pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373.
- Ngabidin, M., Yuswanto, D. T., Yayuk, A. S., Nastiyawati, Huroiyati, A., Purbasari, A., Sanubar, F., & Maulida, Z. (2025). *Buku saku panduan edukasi gizi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di sekolah dasar*. Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Ontran, S. R., & S. (2024). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity*, 2(2), 306–312.
- Pramesthi, I. L., Wiradnyani, L. A. A., Anggraini, R., Februhartanty, J., Widaryat, W., Waluyo, B. H., Wahyunto, A. T., Mansyur, M., & Fahmida, U. (2025). Evaluating the impact of Indonesia’s national school feeding program (ProGAS) on children’s nutrition and learning environment: A mixed-methods approach. *Nutrients*, 17(22), 3575. <https://doi.org/10.3390/nu17223575>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabila, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2855–2866. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>
- Rotinsulu, S. M. K. L. D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1–20.
- S, F. A. D. K., Sari, W. I. R., & Rachmaliana, L. (2025). Government social policy: Implementation of the free nutritious meal program (MBG). *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27, 134–142.
- Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). *Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional* (Edisi ke-4). Cambridge University Press.

Sarjito, A. (2024). Free nutritious meal program as a human resource development strategy to support national defence. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5), 129–141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>

Simangungsong, G. A., & Sinaga, L. V. (2026). Tanggung jawab perdata pengelola dapur program makan bergizi gratis (MBG) menurut KUHPerdata terhadap pasca kasus keracunan makanan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(8), 1340–1347.

Sumilat, R. R. I. (2025). *Sosiologi hukum dalam kebijakan makan bergizi gratis menuju pembangunan berkelanjutan*. Metro Press Indonesia.

Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A policy implementation review of the free nutritious meal (MBG) program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>

Syahlan, & Malau, P. (2025). *Politik hukum*. Zifatama Jawara.

Ujung, P., Sudarsin, H., Usman, S., & Malau, P. (2026). Keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1206–1215. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4418>

Wibisono, M. I., & Santosa, S. (2026). Implementasi program makan bergizi gratis dalam meningkatkan ketahanan gizi pelajar di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 11973–11981. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5365>

Yadiman. (2025). *Kajian program MGB (makan bergizi gratis)*. Badan Gizi Nasional.

Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran program makanan bergizi gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 426–435.